



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITMA INDRAYANI
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 60343

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.660.600.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 672 m2/476 m2 di KAB / KOTA KOTA
PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 362 m2/288 m2 di KAB / KOTA LIMA
PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
5. Tanah Seluas 770 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, KIJANG LGX MOBIL Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 22.618.970**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.794.218.970



III. HUTANG

Rp.

505.666.648

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.288.552.322

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.